



## ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA: KE ARAH STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Arif Widodo, I Nyoman Karma, Muhammad Irawan Zain, Umar\*, Lalu Wira Zain Amrullah  
Universitas Mataram, Indonesia  
E-mail: [umarelmubaraq90@unram.ac.id](mailto:umarelmubaraq90@unram.ac.id)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi dan wawancara. Data dikumpulkan dari delapan sekolah pada jenjang sekolah dasar di kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok Tengah. Subjek dalam penelitian adalah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tahapan penelitian terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan sejak pengambilan data dilapangan hingga penyusunan laporan penelitian. Keabsahan data dicek menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima kebijakan utama yang digunakan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar dalam Kurikulum Merdeka. Strategi yang digunakan antara lain membentuk komunitas belajar, optimalisasi platform edukasi, penguatan kolaborasi guru dalam satu fase, melakukan in house training, dan membangun kolaborasi dengan lembaga eksternal. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi sekolah dasar secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar.

**Kata-kata Kunci:** kebijakan sekolah, kualitas pendidikan, Kurikulum Merdeka, sekolah dasar

## ANALYSIS OF SCHOOL POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENT CURRICULUM: TOWARDS STRATEGIES FOR IMPROVING THE QUALITY OF PRIMARY EDUCATION

**Abstract:** The purpose of this study is to analyze school policies to improve the quality of education in elementary schools through the implementation of the Merdeka curriculum. The type of research used is qualitative with a case study approach. Data collection using observation and interview techniques. Data were collected from eight schools at the elementary school level in the Mandalika special economic zone of Central Lombok. The subjects of the study are teachers, school principals, and school supervisors. The research stages consist of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Data analysis was carried out from data collection in the field to the preparation of research reports. Data validity was checked using triangulation techniques. The results showed that there are five main policies used by schools to improve the quality of education in primary schools in the independent curriculum. The strategies used include forming learning communities, optimizing educational platforms, strengthening teacher collaboration in one phase, conducting in-house training, and building collaboration with external institutions. The findings of this study can be a reference material for primary schools, in general, to improve the quality of education in the implementation of the independent curriculum in primary schools.

**Keywords:** Education quality, elementary school, Merdeka Curriculum, school policy

### PENDAHULUAN

Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan yang cukup cepat dalam dua dekade terakhir. Kurikulum terbaru yang

diluncurkan pemerintah pusat diberi nama kurikulum "Merdeka". Perubahan zaman dan tuntutan global merupakan alasan terkuat mengapa kurikulum harus dirubah (Arends & Kilcher, 2010);(Laiduc & Covarrubias, 2022).

Namun demikian setiap pergantian kurikulum selalu diwarnai dengan problematika. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kemampuan sekolah dalam menyesuaikan perubahan kurikulum masih lambat (Gough, 1999);(Erstad & Voogt, 2018). Misi perubahan kurikulum banyak terkendala dalam tataran implementasi yaitu di level sekolah. Implikasinya adalah misi perubahan kurikulum selalu tidak berjalan tuntas. Pada hakekatnya semua kurikulum disusun dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Ansloos et al., 2022). Namun demikian, dengan keterbatasan yang dimiliki guru perubahan kurikulum tidak berkontribusi secara maksimal. Alih-alih dapat meningkatkan kualitas pendidikan, perubahan kurikulum justru dianggap banyak menyusahakan guru dalam praktiknya. Terlebih lagi dengan adanya stigma “ganti menteri ganti kurikulum” semangat guru dalam menyambut pergantian kurikulum semakin lemah. Jika kondisi semacam ini dibiarkan maka peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan tidak akan terwujud.

Guru sebagai aktor kunci dalam penerapan kurikulum pada level mikro sering menjadi sasaran ketika kurikulum tersebut gagal diimplementasikan. Terdapat beberapa faktor penghambat guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka, mulai dari faktor internal hingga eksternal (Bawani & Mphahlele, 2021). Faktor internal berkaitan dengan mindset, kemampuan beradaptasi, hingga keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi. Faktor eksternal terdiri dari minimnya fasilitas sekolah hingga kebijakan dalam kurikulum itu sendiri. Salah satu kebijakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah penggunaan platform Merdeka mengajar sebagai sarana edukasi guru sehingga tidak ada pelatihan khusus seperti pada kurikulum sebelumnya. Misi perubahan yang diusung dalam Kurikulum Merdeka adalah kemandirian dan kemerdekaan dalam membuat kurikulum

operasional sehingga guru diharapkan belajar secara mandiri melalui platform yang disediakan pemerintah. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan baru di level sekolah terutama sekolah-sekolah yang minim fasilitas internet dan sumber daya guru terbatas. Dampak dari kondisi tersebut adalah guru tidak dapat memahami secara utuh materi tentang kurikulum baru yang diluncurkan pemerintah pusat sehingga kesulitan dalam implementasinya.

Munculnya berbagai macam problematika implementasi kurikulum maka setiap sekolah memiliki kebijakan pada level mikro. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menghadapi tantangan dan percepatan implementasi Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator kualitas pendidikan dalam Kurikulum Merdeka antara lain: tercapainya pembelajaran berbasis kebutuhan siswa, pemahaman guru tentang Kurikulum Merdeka meningkat, dan terwujudnya lingkungan belajar yang ramah anak. Dengan tercapainya indikator tersebut diharapkan pembelajaran lebih efektif, terjadi pemerataan pendidikan dan tidak ada siswa yang tertinggal. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Patphol, 2022) bahwa tujuan akhir dari kebijakan kurikulum adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kebijakan sekolah sebagai upaya menghadapi tantangan dan percepatan implementasi Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi sekolah dasar secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini fokus pada pendeskripsian kebijakan dan strategi

peningkatan mutu sekolah terkait implementasi Kurikulum Merdeka. Menurut (Creswell, 2013) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. Pendekatan penelitian deskriptif juga diharapkan dapat memaparkan hasil penelitian dengan jelas dan mudah dipahami. Lokasi pengambilan data yaitu di delapan sekolah SD/MI yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Subjek dalam penelitian ini adalah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik sampling ini digunakan karena mempertimbangkan subjek penelitian berasal dari sekolah yang sedang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Terdapat tiga instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu peneliti sendiri, yang dipadukan dengan angket, pedoman wawancara dan lembar observasi. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil jawaban angket, transkrip hasil wawancara, dan hasil observasi. Untuk mendapatkan data terkait dengan tantangan, kebijakan, dan strategi peningkatan mutu sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka, peneliti melakukan beberapa langkah untuk mengumpulkan data, yaitu memberikan angket kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Untuk menggali lebih dalam informasi yang diberikan melalui angket, peneliti melakukan wawancara kepada guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan kebijakan di sekolah. Setelah proses pengumpulan data selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019) yaitu (1) kondensasi data, (2) penyajian data, (3) kesimpulan / verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Implementasi Kurikulum Merdeka dan tantangannya*

Salah satu tujuan dari perubahan kurikulum adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bertolak dari sejarah dalam setiap perubahan kurikulum selalu diwarnai dengan gejala dalam implementasinya. Hal ini tidak terlepas dari ketidaksiapan sekolah untuk menerima perubahan kurikulum yang baru. Berikut ini dapat disajikan tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SD/MI di kawasan ekonomi khusus mandalika: *Pertama*, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Kendala sumber daya ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan sekolah untuk secara efektif menerapkan kurikulum baru ini. Dari hasil wawancara diketahui beberapa masalah yang terkait dengan sumber daya antara lain: keterbatasan dana, keterbatasan bahan ajar yang memadai, dan kurangnya infrastruktur teknologi. *Kedua*, rendahnya kompetensi guru terkait Kurikulum Merdeka. Dari hasil wawancara penyebab rendahnya pemahaman guru terkait Kurikulum Merdeka dipengaruhi oleh beberapa aspek di bawah ini: a). Kurangnya Informasi dan pemahaman terkait Kurikulum Merdeka. b). Masih banyak guru belum menerima pelatihan yang memadai untuk membantu mereka memahami dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Untuk menerapkan dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ini dengan baik, diperlukan pelatihan dan pengembangan yang cukup bagi guru. Sayangnya, masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait dengan kurikulum baru ini. Pelatihan yang kurang dapat menghambat kemampuan guru untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara utuh. *Ketiga*, mindset (pola pikir tetap). Kurikulum Merdeka memerlukan

perubahan dalam mindset guru dalam pendidikan. Perubahan seperti ini memerlukan waktu dan usaha, dan mungkin menghadirkan resistensi di antara beberapa pihak yang lebih suka pendekatan lama. Namun faktanya, dari hasil wawancara bahwa guru seringkali menganggap perubahan kurikulum sebagai sesuatu yang merepotkan. Guru merasa tidak nyaman terhadap perubahan kurikulum itu sendiri. Kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan dalam metode pembelajaran dan penilaian. Guru dan siswa yang sudah nyaman dengan cara lama mungkin merasa cemas atau resisten terhadap perubahan ini.

#### *Model kebijakan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka*

Dalam upaya percepatan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar, kepala sekolah memiliki kebijakan yang dirancang khusus untuk menyambut Kurikulum Merdeka ini. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi hambatan serta meningkatkan mutu pendidikan. Pada dasarnya dalam konteks pembelajaran guru sudah mampu menganalisis capaian pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sebagian guru juga sudah mampu menyusun modul ajar yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Namun demikian tantangan yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka masih banyak ditemui, antara lain guru masih kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, kesulitan dalam menentukan alokasi waktu dan alur tujuan pembelajara, masih kesulitan dalam mengintegrasikan Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran dan kesulitan dalam menentukan alokasi waktu dalam mengimplementasikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Bertolak dari berbagai kendala dan tantangan dalam implementasi kurikulum tersebut maka sekolah perlu

mengeluarkan kebijakan. Kebijakan sekolah ini dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam era Kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan kebijakan yang di keluarkan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pembentukan komunitas belajar di sekolah. Komunitas belajar ini dibentuk sebagai salah satu wadah untuk menyediakan ruang belajar bagi guru dalam memperdalam seluk beluk Kurikulum Merdeka. Komunitas belajar ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan pengetahuan guru terhadap Kurikulum Merdeka. Dengan adanya komunitas belajar ini guru dapat berbagi informasi tentang Kurikulum Merdeka dan berbagi praktik baik terkait keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komunitas memiliki dampak yang sangat baik dalam proses pembelajaran (Stassen, 2003); (DuFour, 2004); (Vescio et al., 2008); (Purwandari et al., 2022). Jika seorang guru aktif dengan komunitas belajarnya maka kompetensinya akan semakin meningkat (Liang et al., 2022).

*Kedua*, optimalisasi penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sumber belajar. Keberadaan PMM ini sangat membantu guru dalam mengembangkan pengetahuan secara mandiri dan berbagi pengalaman dengan guru dari seluruh Indonesia. Namun demikian pemanfaatan PMM ini masih terbatas pada guru yang berada di bawah naungan dinas pendidikan, untuk madrasah yang dibawah naungan kemenag belum dapat mengakses PMM dengan tuntas karena terkendala dengan belum aktifnya akun belajar id yang dimiliki. Akibatnya guru dari madrasah hanya dapat mengakses PMM pada bagian luarnya saja sehingga informasi yang didapatkan masih terbatas juga. Kepala sekolah mewajibkan guru untuk mengakses PMM supaya pengetahuan terkait implementasi Kurikulum Merdeka dapat meningkat. Kebijakan ini

diambil agar guru memiliki literasi digital. Dengan adanya literasi digital seseorang dapat memperbarui pengetahuannya secara mandiri secara berkala (Lanphier & Carini, 2022). Penggunaan literasi digital ini harus terus ditingkatkan agar guru tidak ketinggalan zaman serta menemukan komunitas belajar sebagai sarana berbagi praktik baik.

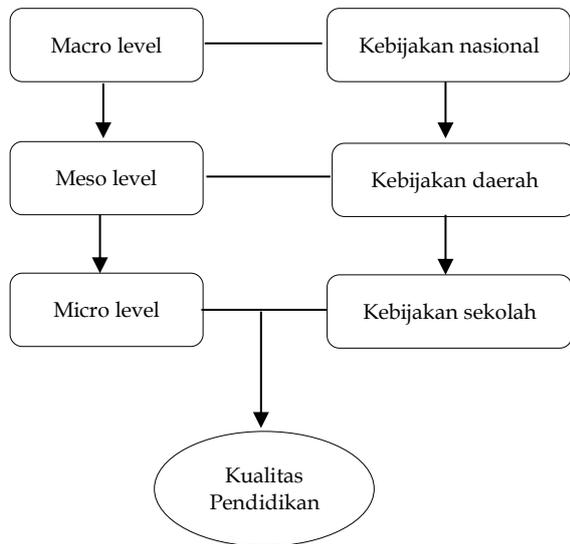
*Ketiga*, penguatan kolaborasi guru dalam satu fase. Penguatan kolaborasi guru antar fase sangat dibutuhkan. Kepala sekolah menekankan pentingnya kolaborasi guru antar fase ini karena dalam Kurikulum Merdeka capaian pembelajaran dikelompokkan dalam fase. Tiap fase terdiri dari dua kelas sehingga dalam menentukan tujuan pembelajaran guru tiap fase harus bekerjasama. Kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menentukan alur tujuan pembelajaran, tingkat kesulitan materi Pelajaran dan keberlanjutan materi yang diajarkan pada kelas sebelumnya. Dengan adanya kolaborasi ini guru dalam satu fase dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada kelas sebelumnya dan mengajarkannya kembali pada kelas berikutnya jika tujuan pembelajaran belum tercapai. Kolaborasi semacam ini merupakan bentuk komunitas belajar dalam skala kecil yang dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar (Oppi & Eisenschmidt, 2022); (Gore & Rosser, 2022).

*Keempat*, In house training (IHT). In-House Training adalah sebuah bentuk program pelatihan, dimana materi pelatihan, waktu serta tempat pelatihan ditentukan sesuai dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh peserta sekolah. In-house ini dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM guru di sekolah. In house training pun akan sangat membantu meningkatkan kualitas SDM guru yang menjadi eksekutor Kurikulum Merdeka di sekolah. IHT ini sangat berperan dalam menentukan keberhasilan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka (Imam &

Nasihah, 2022). Selain berkaitan dengan kurikulum, IHT ini juga berisi tentang materi yang berkaitan dengan penguatan teknologi informasi, mengingat masih banyak guru yang masih gptek. Maka dari itu guru dilatih agar memiliki kemampuan yang baik dalam hal IT sehingga dapat mengakses PMM maupun media pembelajaran digital lainnya dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka. Selain IHT pembinaan pengawas sekolah sebagai kepanjangan tangan dari dinas pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pengawas juga yang berperan sebagai pengontrol kualitas pendidikan di sekolah dasar (Hilts et al., 2022).

*Kelima*, membangun kolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekolah terus berupaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, antara lain universitas, dinas pendidikan, dunia kerja, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Keberadaan pihak eksternal ini semakin memperkaya kekuatan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam era Kurikulum Merdeka. Hal ini dikarenakan dalam Kurikulum Merdeka siswa tidak hanya belajar di dalam kelas saja tetapi juga harus memiliki pengalaman nyata sehingga keberadaan pihak eksternal ini sangat dibutuhkan. Kolaborasi dengan pihak eksternal membuka kesempatan sekolah untuk lebih maju sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat (Jakhelln & Postholm, 2022); (Garbacz et al., 2022); (Patrick, 2022).

Bentuk model kebijakan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model kebijakan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka

Berdasarkan skema yang disajikan pada Gambar 1 terlihat sangat jelas bahwa sekolah merupakan pelaksana kebijakan kurikulum pada level yang paling bawah, namun berperan sebagai ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan. Pada level makro atau level nasional yang berperan sebagai penentu kebijakan adalah kementerian pendidikan. Pada level meso yang berperan adalah dinas pendidikan daerah sebagai pengontrol kualitas pendidikan di daerah. Meskipun berada pada level paling bawah, sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam implementasi kurikulum. Pada Kurikulum Merdeka sekolah diberi kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat (Gordon et al., 2019) dalam pengembangan kurikulum dapat dilakukan pada beberapa level, namun sekolah memiliki wewenang yang sangat besar apakah kurikulum yang dikembangkan pada level atas dapat diimplementasikan atau tidak. Partisipasi guru dalam pengembangan kurikulum berpengaruh terhadap bagus atau tidaknya kurikulum di sekolah (Taylor & Bogotch, 1994). Pada level sekolah inilah kualitas pendidikan yang sesungguhnya dapat dilihat (Wang, 2014); (Krüger et al., 2007);(Caprara et al., 2006). Dengan adanya

kebijakan yang dilakukan sekolah minimal sekolah dikawasan ekonomi khusus mandalika telah meningkat level kesiapan dalam implementasi Kurikulum Merdeka dari level awal menuju level berkembang. Hal ini berdampak pada meningkatnya pemahaman guru tentang kurikulum “Merdeka” meningkat sehingga pembelajaran berbasis kebutuhan siswa dan lingkungan belajar yang ramah anak dapat terwujud.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata sekolah di kawasan ekonomi khusus Mandalika masih dalam tahap transisi kurikulum. Namun dengan adanya kebijakan pada level sekolah secara perlahan sekolah sudah mulai berkembang dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Tantangan yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka antara lain: keterbatasan sumber daya, masih ada guru yang memiliki pola pikir tetap dan kurangnya pengetahuan guru terhadap hakekat Kurikulum Merdeka. Kebijakan yang diterapkan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka antara lain: mendorong pembentukan komunitas belajar, optimalisasi platform edukasi sebagai sumber belajar bagi guru, penguatan kolaborasi antar guru dalam satu fase, melakukan in-house training, melibatkan pengawas sekolah sebagai pendamping implementasi Kurikulum Merdeka.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih banyak kendala yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka, maka dari itu terdapat beberapa saran yang diberikan untuk menghadapi kendala tersebut. Beberapa saran yang diberikan antara lain: Bagi dinas pendidikan disarankan untuk memperbanyak pelatihan dan pendampingan kepada guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Bagi sekolah disarankan memperkuat komunitas belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan berbagi pengalaman antara guru dengan guru maupun dengan kepala sekolah. Bagi guru disarankan untuk terus melakukan peningkatan kompetensi diri dengan cara belajar mandiri melalui platform Merdeka mengajar yang disediakan pemerintah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didanai oleh dana PNBPU Universitas Mataram dengan nomor kontrak penelitian 1916/UN18.L1/PP/2023. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kelompok peneliti bidang PGSD, BP3MF, dan LPPM Universitas Mataram yang telah memberikan banyak bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ansloos, J., Day, S., Peltier, S., Graham, H., Ferguson, A., Gabriel, M., Stewart, S., Fellner, K., & DuPré, L. (2022). Indigenization in clinical and counselling psychology curriculum in Canada: A framework for enhancing Indigenous education. *Canadian Psychology / Psychologie Canadienne*. <https://doi.org/10.1037/cap0000335>
- Arends, & Kilcher, A. (2010). *Teaching for Student Learning: Becoming an accomplished teacher*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203866771>
- Bawani, E. L., & Mphahlele, R. S. S. (2021). Investigating the role of teacher training of reception teachers in implementing the pre-primary curriculum in Francistown, Botswana. *South African Journal of Childhood Education*, 11(1). <https://doi.org/10.4102/sajce.v11i1.882>
- Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level. *Journal of School Psychology*, 44(6), 473-490. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2006.09.001>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design*. SAGE Publication.
- DuFour, R. (2004). What is a "professional learning community"?. *Educational Leadership*, 61(8), 6-11.
- Erstad, O., & Voogt, J. (2018). *The Twenty-First Century Curriculum: Issues and Challenges* (pp. 19-36). [https://doi.org/10.1007/978-3-319-71054-9\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-71054-9_1)
- Garbacz, A., Godfrey, E., Rowe, D. A., & Kittelman, A. (2022). Increasing Parent Collaboration in the Implementation of Effective Practices. *TEACHING Exceptional Children*, 54(5), 324-327. <https://doi.org/10.1177/00400599221096974>
- Gordon, W. R., Taylor, R. T., & Oliva, P. F. (2019). *Developing The Curriculum Improved Outcomes Through Systems Approaches*. Pearson Education, Inc.
- Gore, J., & Rosser, B. (2022). Beyond content-focused professional development: powerful professional learning through genuine learning communities across grades and subjects. *Professional Development in Education*, 48(2), 218-232. <https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1725904>
- Gough, N. (1999). Globalization and school curriculum change: locating a transnational imaginary. *Journal of Education Policy*, 14(1), 73-84. <https://doi.org/10.1080/026809399286503>
- Hilts, D., Peters, H. C., Liu, Y., & Luke, M. (2022). The model for supervision of school counseling leadership. *Journal of Counselor Leadership and Advocacy*, 9(2), 99-114. <https://doi.org/10.1080/2326716X.2022.2032871>
- Imam, T., & Nasihah, F. (2022). In House Training Implementation of the Independent Curriculum based Tatanen in Bale Atikan at UPTD SD Negeri Salem, Pondoksalam. *Indonesian Journal of Society Development*, 1(2), 83-104. <https://doi.org/10.55927/ijds.v1i2.2206>
- Jakhelln, R., & Postholm, M. B. (2022). University-school collaboration as an arena for community-building in

- teacher education. *Educational Research*, 64(4), 457-472. <https://doi.org/10.1080/00131881.2022.2071750>
- Krüger, M. L., Witziers, B., & Slegers, P. (2007). The impact of school leadership on school level factors: Validation of a causal model. *School Effectiveness and School Improvement*, 18(1), 1-20. <https://doi.org/10.1080/09243450600797638>
- Laiduc, G., & Covarrubias, R. (2022). Making meaning of the hidden curriculum: Translating wise interventions to usher university change. *Translational Issues in Psychological Science*, 8(2), 221-233. <https://doi.org/10.1037/tps0000309>
- Lanphier, T. S., & Carini, R. M. (2022). A Process Evaluation of a Learning Community Program: Implemented as Designed? *Education Sciences*, 12(1), 60. <https://doi.org/10.3390/educsci1201060>
- Liang, W., Song, H., & Sun, R. (2022). Can a professional learning community facilitate teacher well-being in China? The mediating role of teaching self-efficacy. *Educational Studies*, 48(3), 358-377. <https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1755953>
- Oppi, P., & Eisenschmidt, E. (2022). Developing a professional learning community through teacher leadership: A case in one Estonian school. *Teaching and Teacher Education: Leadership and Professional Development*, 1, 100011. <https://doi.org/10.1016/j.tatelp.2022.100011>
- Patphol, M. (2022). Developing A Training Curriculum Using Professional Learning Community For Enhancing Teachers' Learning Management Skills To Promote Students' Creativity And Innovation Ability: A Case Study Of Thai Teachers. *Creativity Studies*, 15(1), 199-216. <https://doi.org/10.3846/cs.2022.13278>
- Patrick, S. K. (2022). Organizing Schools for Collaborative Learning: School Leadership and Teachers' Engagement in Collaboration. *Educational Administration Quarterly*, 58(4), 638-673. <https://doi.org/10.1177/0013161X221107628>
- Purwandari, E. P., Junus, K., & Santoso, H. B. (2022). Exploring E-Learning Community of Inquiry Framework for Engineering Education. *International Journal of Instruction*, 15(1), 619-632. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15135a>
- Stassen, M. L. A. (2003). Student Outcomes: The Impact of Varying Living-Learning Community Models. *Research in Higher Education*, 44, 581-613. <https://doi.org/10.1023/A:1025495309569>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan* (5th ed.). PT Rineka Cipta.
- Taylor, D. L., & Bogotch, I. E. (1994). School-Level Effects of Teachers' Participation in Decision Making. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 16(3), 302-319. <https://doi.org/10.3102/0162373701603302>
- Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. *Teaching and Teacher Education*, 24(1), 80-91. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.01.004>
- Wang, Y. (2014). *Education policy reform trends in G20 members*. Springer Science & Business Media.